

**BERKAT**

BERITA KHATULISTIWA

Kamis, 6 Oktober 2011

## PAP DPD Kaji Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kalbar

**Pontianak, BERKAT.**

Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kajian terhadap penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara di daerah, salah satunya Kalimantan Barat.

Menurut Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI, Farouk Muhammad, kajian ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan, khususnya pengawasan atas pelaksanaan APBN, termasuk menindaklanjuti secara kelembagaan setiap pelanggaran masyarakat, terutama terkait pelayanan public, khususnya dugaan korupsi, mal administrasi dalam rangka ikut

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, dengan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK ke daerah-daerah.

Selain Kalbar, Kajian Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan Negara ini juga diselenggarakan di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat. "Puncaknya akan dikemas dalam bentuk seminar nasional di Jakarta dan akan disampaikan pemikiran kepada pemerintah dan DPR bagaimana DPD mengembangkan konsep pengelolaan keuangan yang lebih baik," kata Farouk Muhammad.

Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM, mengatakan Pemerintah

Provinsi Kalbar di tahun 2011 mendapatkan dana dekosentrasi yang khusus dialokasikan untuk mendukung peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebesar Rp5,36 miliar yang telah di breakdown ke dalam program dan kegiatan yang lebih ditekankan kepada aktivitas-aktivitas dalam rangka penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah.

"Diantaranya penguatan sinergisitas pembangunan pusat dan daerah, penguatan akuntabilitas APBN di wilayah provinsi, penguatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan APBN di wilayah provinsi serta penguatan koordinasi terhadap aktivitas instansi

vertikal dan daerah otonom di wilayah provinsi," jelasnya.

Terkait aspek pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dekosentrasi dan tugas pembantuan, Wagub Christiandy menambahkan Pemprov Kalbar telah melakukan beberapa penatausahaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintah dengan pejabat pembuat komitmen dari Biro Perekonomian, koordinasi pengendalian administrasi keuangan dan asset pemerintah dengan pejabat pembuat komitmen dari badan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

"Selain itu juga dilakukan koordinasi dalam rangka integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi, memfasilitasi forkopimda dalam mewujudkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dengan pejabat pembuat komitmen dari Biro Pemerintahan," tambahnya. (nia)